

**PERBANDINGAN HUKUM TENTANG PENGANIAYAAN
TERHADAP HEWAN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA INDONESIA DAN LAOS**



**Di susun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

SEKAR LANGIT JATU PAMUNGKAS

C100170019

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERBANDINGAN HUKUM TENTANG PENGANIAYAAN TERHADAP
HEWAN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
INDONESIA DAN LAOS**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

SEKAR LANGIT JATU PAMUNGKAS

C100170019

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen
Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'K' followed by a horizontal line and a small flourish.

Dr. Kuswardani, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

**STUDI KOMPARASI PERBANDINGAN HUKUM TENTANG
PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN ANTARA KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA INDONESIA DAN LAOS**

OLEH

**SEKAR LANGIT JATU PAMUNGKAS
C100170019**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 10 Juli 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

**1. Dr. Kuswardani, S.H.M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)**

**2. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.
(Anggota I Dewan Penguji)**

**3. Marisa Kurnianingsih, S.H., M.Kn.
(Anggota II Dewan Penguji)**

()
()
()

Dekan



Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini saya tulis atas hasil pemikiran dan ide saya sendiri dengan masukan-masukan dari dosen pembimbing, serta tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, Maka saya akan bertanggung jawab atas hal tersebut dengan mengikuti hukum yang sah dan berlaku di Indonesia.

Surakarta, 10 Juli 2021

Penulis



SEKAR LANGIT JATU PAMUNGKAS

C100170019

PERBANDINGAN HUKUM TENTANG PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA INDONESIA DAN LAOS

Abstrak

Kasus penganiayaan terhadap hewan di Indonesia semakin beragam seperti memakan hewan secara hidup-hidup. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Peternakan Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Namun di negara Laos menggunakan hewan untuk membawa beban berat seperti gajah pada upacara tahun baru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan bentuk-bentuk tindak pidana penganiayaan hewan dalam hukum pidana Indonesia dan Laos, mengetahui perbandingan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan hewan dalam hukum pidana Indonesia dan Laos, dan mengetahui perbandingan sanksi tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dalam hukum pidana Indonesia dan Laos. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Kemudian data akan dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data sekunder. Data akan dianalisa dengan metode teknik deskripsi, intepretasi, sistematisasi, argumentasi dan evaluasi.

Kata Kunci: hukum pidana, penganiayaan hewan, laos, indonesia.

Abstract

Cases of animal mistreatment in Indonesia are increasingly diverse such as eating animals alive. This has been stipulated in Livestock Law No. 41 of 2014 on Livestock and Animal Health. But in Laos the country uses animals to carry heavy loads such as elephants at new year's ceremonies. The purpose of this study is to find out the comparison of the forms of animal abuse crimes in Indonesian and Laotian criminal law, to know the comparison of elements of animal abuse crimes in Indonesian and Laotian criminal law, and to know the comparison of sanctions for animal mistreatment in Indonesian and Laotian criminal law. This research uses the method of legislation approach and comparison approach. Then the data will be collected by means of literature study. As for the data source used is secondary data. Technical methods of description, interpretation, systematization, argumentation, and evaluation will analyze the data.

Keywords: criminal law, animal mistreatment, laos, indonesia.

1. PENDAHULUAN

Sebagian besar tindak kejahatan yang telah termuat dan di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana, kejahatan menjadi suatu bentuk sikap manusia yang harus kita kawal bersama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman.

Penanganan yuridis kasus-kasus penganiayaan mengalami hambatan-hambatan menyangkut rumusan tindak pidana/delik dalam pasal-pasal yang belum tegas, pembuktian dalam hukum acaranya, dan sifatnya yang sebagian sebagai delik aduan (Supanto, 2004). Sebab utamanya adalah terkait dengan pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan produk hukum peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda, sehingga tidak relevan lagi dengan perubahan dan perkembangan masyarakat, terutama jika dihubungkan dengan keragaman jenis pelecehan seksual sebagai perilaku seks menyimpang yang tidak lagi menjadikan sesama manusia sebagai korban namun telah melebar ke sejumlah jenis hewan. Namun di negara lain, seperti Laos menggunakan hewan dengan membawa beban yang begitu berat seperti gajah pada upacara tahun baru tetap dilaksanakan meskipun hal tersebut terlihat seperti penyiksaan bagi gajah namun tradisi ini tetap dilaksanakan padahal Laos memiliki hukum pidana sendiri yang diberlakukan bagi para penyiksa hewan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan KUHP sebagai sistem hukum pemidanaan Indonesia Mengenai Penganiayaan Terhadap Hewan.

Adapun rumusan permasalahan dari penelitian ini antara lain berfokus pada : 1) Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dalam hukum pidana Indonesia dan Laos? 2) Bagaimana unsur-unsur tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dalam hukum pidana Indonesia dan Laos? Serta 3) Bagaimana sanksi tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dalam hukum pidana Indonesia dan Laos?.

2. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis-Normatif, Pendekatan di dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comparrative Approach*). Jenis Penelitian yang digunakan adalah Normatif yang bersifat Preskriptif. Sumber data yang digunakan adalah Data Sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Laos

Adapun penjabaran tentang penganiayaan ringan terhadap hewan dan kerusakan kesehatan hewan pada pasal ini berupa menyakiti hewan tanpa maksud tertentu atau justeru melewati batas kemampuan hewan. Ini sering terjadi pada hewan peliharaan di rumah seperti kucing yang ditendang, atau melemparkan hewan dari suatu tempat yang lebih tinggi. Adapun objeknya adalah hewan sebagai korban dari kekerasan yang dilakukan oleh manusia ataupun badan hukum. Adapun dalam huruf b, penelantaran hewan dan tidak memberikan kehidupan yang layak juga termasuk pada penganiayaan terhadap hewan. tidak memberikan dan tidak mengupayakan pengobatan hewan yang dimiliki juga masuk pada tidak memberikan kehidupan yang layak bagi hewan peliharaannya. Kata binatang itu mempunyai pengertian yang lebih luas dari ternak, hingga dapat dimasukkan kedalam pengertiannya, yakni kuda, anjing, kera, kelinci, tikus, dan binatang-binatang lain yang biasa dipakai orang untuk melakukan penelitian-penelitian ilmiah di dalam laboratorium-laboratorium.

Penganiayaan berat pada hewan ditemukan dalam Pasal 302 ayat (2) yang menyatakan bahwa Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dan seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan. Artinya penganiayaan berat bagi hewan ialah tindakan yang menyebabkan hewan mengalami sakit lebih dari seminggu hingga kematian.

Bentuk tindak pidana penganiayaan hewan dalam Hukum Penal Laos baru dimasukkan pada tahun 2018, yang diatur dalam Pasal 353 Penal Code yang diperbarui menyatakan bahwa :

- 1) individu yang menyalahgunakan atau menganiaya hewan, termasuk tindakan seperti penahanan tanpa makanan atau air, penggunaan hewan untuk kerja tanpa istirahat yang cukup, pemukulan parah, pengangkutan dalam kondisi di bawah standar, penyembelihan hewan yang kejam, atau penggunaan racun terhadap hewan, akan menghadapi hukuman penjara atau denda antara 500.000 kip hingga 3.000.000 kip,*

- 2) *Kemudian bagi pelaku berulang atau residivis, akan menghadapi hukuman penjara dari tiga bulan hingga satu tahun, dan didenda hingga 10.000.000 kip.*

Sebelumnya dalam Undang-Undang Penal yang diberlakukan pertama kali di Negara Laos pada tahun 1990 tidak secara spesifik mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap hewan ini, artinya jika dibandingkan dengan Indonesia, Indonesia telah lebih dahulu memuat aturan mengenai penganiayaan hewan dalam KUHP Indonesia meskipun KUHP tersebut bukan rumusan asli dari masyarakat Indonesia melainkan warisan dari jaman kolonial Belanda. Adapun pengaturan pertama kali mengenai penganiayaan hewan pada Hukum Penal Laos ditemukan dalam ketentuan Pasal Pasal 56 yaitu mengenai Penghancuran yang mengatur:

Setiap orang yang, dengan niat merusak atau melemahkan Negara atau perekonomian nasional, melakukan salah satu tindakan berikut ini akan dihukum delapan hingga dua puluh tahun penjara dan akan didenda dari 5.000.000 Kip hingga 100.000.000 Kip: menghancurkan, merusak, atau membakar tanaman, pabrik, kantor, gedung instansi, jalan, fasilitas komunikasi, kendaraan pengangkut, peralatan telekomunikasi atau fasilitas lain yang merupakan infrastruktur ekonomi [,] [atau] melepaskan bahan kimia atau virus beracun di antara masyarakat atau hewan. Selain itu, harta benda orang tersebut dapat disita sebagaimana diatur dalam Pasal 32 undang-undang ini, dan orang tersebut dapat ditempatkan di bawah tahanan rumah, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau dikenakan hukuman mati.

Dari penjelasan diatas, maka dipahami bahwa tindakan penganiayaan hewan belum diatur secara spesifik namun keberadaannya tetap dilindungi oleh hukum negara tersebut dengan menyamakan kedudukannya dengan manusia sebagai objek yang dilindungi dalam tindak pidana penghancuran dengan penyebaran bahan berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan keberadaan manusia dan hewan, selebihnya ketentuan mengenai tindak pidana penganiayaan hewan belum ditemukan dalam Undang-undang Penal yang diberlakukan pertama kali di Negara Laos ini.

3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Laos

Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Dalam Hukum Pidana Indonesia. Pasal 302 angka 1 ayat (1) KUHPidana, terdiri beberapa unsur–unsur sebagai berikut :

Pertama, unsur unsur “Dengan kesengaja”. Dalam unsur tersebut bahwa Menimbang, bahwa dalam literatur hukum pidana dikenal 3 (tiga) tingkatan kesengajaan, yaitu sengaja sebagai tujuan, sengaja dengan kesadaran pasti berhasil dan sengaja dengan kemungkinan berhasil.

Dalam hukum pidana dikenal dengan teori kesengajaan. Dalam teori tersebut bahwa terbagi dalam aspek penting:

- a. Teori Kehendak (*Wilstheori*) dari VON HIPPEL;
- b. Teori pengetahuan (*Voostellingstheori*) dari FRANK;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah bila Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang dan dikehendaki artinya walaupun perbuatan tersebut dilarang tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu, sedangkan tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau kapasitas untuk melakukan perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang melakukan tindak pidana.

Apabila dihubungkan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Lamintang, bahwa mengenai pemenuhan unsur tindak pidana atas suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang subjek maka dapat memenuhi unsur pembuktian artinya bahwa penuntut umum harus mampu memenuhi bukti dari unsur tindak pidana yang dilakukan agar mampu menghukum subjek tersebut selaku terpidana dengan hukuman sebagaimana mestinya, adapun yang harus dibuktikan dalam tahapan pembuktian ialah:

- a. Adanya kehendak pelaku untuk menimbulkan rasa sakit
- b. Adanya kehendak pelaku untuk menimbulkan luka
- c. Adanya kehendak pelaku untuk merugikan kesehatan hewan
- d. Adanya pengetahuan pelaku bahwa perbuatannya itu telah ditujukan pada seekor binatang.

Dalam unsur “Barang Siapa” bahwa berdasarkan penafsiran yuridis sputusan Mahkamah Agung RI No.1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. tersebut mengacu kepada subjek yang diduga yang melakukan suatu perbuatan pidana. Pertimbangan hakim diatas senada dengan pendapat R.O Siahaan yang mneyatakan bahwa orang yang melakukan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yakni dikenal dengan mens rea, disebut juga sebagai syarat subjektif (Siahaan, 2009). Berdasarkan pendapat tersebut artinya setiap orang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang telah dilakukan olehnya. Perbuatan tersebut tidak menghilangkan unsur kesalahan dalam melakukan tindak pidana.

Dalam unsur ini bahwa subjek hukum pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan tersebut berdasarkan unsur pasal tersebut wajib memenuhi tanpa tujuan yang pantas, artinya perbuatan pelaku tersebut sebagai bentuk perbuatan yang tidak layak untuk dilakukan walaupun konteksnya bukan termasuk kedalam subjek hukum manusia namun secara hukum bahwa terdapat aspek yang menjadikan perbuatan penganiaayaan terhadap hewan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan menjadi bagian dari aspek unsur yang wajib di penuhi dalam perbuatan hukum terdakwa tersebut.

Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh terdakwa masuk kategori perbuatan hukum yang di lakukan oleh pelaku tersebut. namun permasalahan tidak ada indikator yang jelas mengenai melampaui batas. Sehingga perlu dilakukan penafsiran hukum secara gramatikal berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kata melampaui tersebut berasal dari kata “lampau” di mana kata melampaui tersebut ditafsirkan melalui, melewati dan melebihi.

Bahwa unsur ini berkaitan dengan akibat dari tindakan pelaku yang melampui batas tersebut sehingga mengakibatkan suatu rasa sakit , luka atau merugikan kesehatan. jadi berdasarkan asas kausalitas terdapat sebab akibat di mana akibat dari kondisi suatu rasa sakit , luka atau merugikan kesehatan tersebut diakibatkan oleh perbuatan pelaku. Jadi hal ini berkaitan dengan asas kausalitas bahwa terdapat suatu aspek yang mempermasalahkan hingga seberapa jauh suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai penyebab dari suatu keadaan, atau hingga

berapa jauh suatu keadaan itu dapat dipandang sebagai suatu akibat dari suatu tindakan, dan sampai di mana seseorang yang telah melakukan tindakan tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana (Pawennei dan Tomalili, 2015).

Dalam unsur ini merupakan objek atas sasaran perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku atas penganiayaan terhadap hewan tersebut. alasan penulis menjadi seekor binatang ini sebagai objek karena memang dalam hukum pidana hanya mengenai subjek hukum pada manusia.

Pada pasal 504 Unsur-unsurnya adalah : Unsur Melakukan pekerjaan yang terang melebihi kemampuan. Tentang arti dari kata “yang terang” atau “secara nyata”, yang dimaksudkan ‘secara nyata’ adalah dapat dilihat secara jelas dari luar”. Jadi, melebihi atau tidak melebihi kekuatan hewan itu, cukup berdasarkan pandangan dari orang-orang yang ada di tempat kejadian (Soesilo, 1991).

Unsur “Melakukan siksaan, memperkerjakan hewan yang cacat, pincang, hamil atau menyusui”. Dalam unsur tersebut bahwa adanya tindakan yang dilakukan berupa penyiksaan, dalam penyiksaan ini berkaitan dengan aspek fisik yang dilakukan pelaku. Jadi pelaku tersebut secara sadar melakukan siksaan tanpa melihat kondisi hewan tersebut. selanjutnya unsur memperkerjakan hewan yang cacat. Di mana dalam hal ini hewan yang cacat adalah hewan yang memiliki kelainan seperti hewan pada umumnya secara gramatikal hewan yang cacat yang juga sangat erat kaitannya dengannya pincang tersebut tidak mampu melakukan aktivitas seperti hewan normal.

Unsur “Memperkerjakan hewan dengan cara menyakiti dan Memperkerjakan hewan dengan tanpa memberi makanan dan minuman”. Bahwa berdasarkan aspek hukum dalam unsur pasal tersebut bahwa dikasi kata Memperkerjakan hewan dengan cara menyakiti ini berkaitan dengan melakukan eksploitasi terhadap hewan yang menyebabkan hewan tersebut mengalami perlakuan yang tidak manusiawi yang dilakukan pelaku tersebut.

Berdasarkan ketentuan pasal 541 KUHP bahwa terdapat aspek penting adalah siapapun yang melakukan meduia kuda wajib mempertankan nilai-nilai yang terandung didalamnya. Berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal 544 berkaitan dengan legalitas untuk melakukan sabungan ayam perlu mendapatkan

izin terlebih dahulu sebelum melakukan sabung ayam atau jangkrik tersebut yang dilakukan di kawasan umum. Jadi proses pemberian tersebut nantinya sebagai landasan hukum para pihak yang melakukan sabung ayam tersebut. maka adanya kewajiban mendapatkan izin tersebut sebagai bukti bahwa negara hadir dalam segala persoalan yang dialami oleh pelaku tersebut. bahwa kategori pasal 544 KUHP diatas berdasarkan ketentuan ayat (2) tersebut masuk dalam kategori pelanggaran hukum.

3.3 Hukum Pidana Laos

Adapun landasan hukum berdasarkan ketentuan hukum pidana di negara laos adalah diatur dalam Pasal 353 Penal Code yang diperbarui menyatakan bahwa:

individu yang menyalahgunakan atau menganiaya hewan, termasuk tindakan seperti penahanan tanpa makanan atau air, penggunaan hewan untuk kerja tanpa istirahat yang cukup, pemukulan parah, pengangkutan dalam kondisi di bawah standar, penyembelihan hewan yang kejam, atau penggunaan racun terhadap hewan, akan menghadapi hukuman penjara atau denda antara 500.000 kip hingga 3.000.000 kip,

Adapun unsur pasal dalam ketentuan pasal diatas bahwa terdapat individu yang menyalahgunakan atau menganiayi hewan. Dalam hal ini pemaknaan individu tersebut sebagai setiap orang artinya istilah yang dipakai tersebut masih sarumpun. Selanjutn unsur penahanan tanpa makanan atau air, penggunaan hewan untuk kerja tanpa istirahat yang cukup, pemukulan parah, pengangkutan dalam kondisi di bawah standar, penyembelihan hewan yang kejam, atau penggunaan racun terhadap hewan. Jadi dalam melakukan tindakan hukum terhadap hewan tersebut adanya batasan yang diberlakukan.

Kemudian bagi pelaku berulang atau residivis, akan menghadapi hukuman penjara dari tiga bulan hingga satu tahun, dan didenda hingga 10.000.000 kip. Bahwa dalam ketentuan hukum tersebut bahwa perlu amengatur mengenai pemberian residivis bagi tindak pidana yang tidak negara laos tersebut. jadi adanya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh perlaku tersebut.

Apabila dikaitkan dengan asas Teori legalitas dapat dijelaskan sebagai konsep pemersatu yang mencakup berbagai prinsip common law dari interpretasi undang-undang. Sejumlah komentator telah mencoba untuk mengidentifikasi perlindungan hukum umum yang mendasar yang tercakup dalam teori legalitas.

Karena sebagai bentuk perlindungan hukum umum yang mendasar yang menganggap bahwa teori legalitas dilindungi kebebasan dari pelanggaran oleh aparat penegak hukum pemberian yurisdiksi di pengadilan dan kepentingan atas hak akses ke pengadilan. Pada Pasal 353 Undang-Undang Penal KUHP Laos menyebutkan:

individu yang menyalahgunakan atau menganiaya hewan, termasuk tindakan seperti penahanan tanpa makanan atau air, penggunaan hewan untuk kerja tanpa istirahat yang cukup, pemukulan parah, pengangkutan dalam kondisi di bawah standar, penyembelihan hewan yang kejam, atau penggunaan racun terhadap hewan, akan menghadapi hukuman penjara atau denda antara 500.000 kip hingga 3.000.000 kip.

Berdasarkan uraian diatas bahwa unsur yang ditekankan adalah aspek tindakan terhadap hewan yang wajib melihat sisi kemanusiaan di mana terdapat larangan-larangan dalam ketentuan tersebut yakni tindakan seperti penahanan tanpa makanan atau air, penggunaan hewan untuk kerja tanpa istirahat yang cukup, pemukulan parah, pengangkutan dalam kondisi di bawah standar, penyembelihan hewan yang kejam, atau penggunaan racun terhadap hewan, akan menghadapi hukuman penjara atau denda antara 500.000 kip hingga 3.000.000 kip.

3.4 Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Laos

Dari pengaturan ketentuan hukum mengenai penganiayaan terhadap hewan yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun diketahui setiap aturan yang diberlakukan tersebut disertai dengan ketentuan sanksi yang dapat diterapkan bagi para pelaku yaitu: Sanksi pidana penjara diberlakukan bagi para pelanggar ketentuan Pasal 320, yaitu penjara 9 bulan.

Pasal 540 yaitu selama paling banyak 8 Hari, Pasal 540 (2) dengan kurungan maksimal 14 hari dan 544 KUHP dengan pidana kurungan paling lama 6 hari serta Pasal 91 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan.dengan pidana kurungan paling singkat 1 Bulan paling lama 6 Bulan.

Pasal 320 dengan ancaman pidana denda paling banyak Rp 300 , Pasal 540 dengan dengan Rp. 2.250,Pasal 541 dengan denda Rp 225, Pasal 544dengan

denda Rp.375 dan Pasal Pasal 91 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan.dengan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Mengenai ketentuan pidana denda yang diatur dalam KUHP, bahwa besaran biaya yang ditetapkan dilipatgandakan sebanyak 1000kali sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP:

Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

Berikutnya macam hukuman diatur dalam ketentuan Pasa; 26 dimana dalam sistem pemidanaan Laos, sanksi pidana yang diberlakukan yaitu: Hukuman pokok yang meliputi kritik publik; pendidikan ulang tanpa perampasan kebebasan; perampasan kebebasan; hukuman mati.

Hukuman tambahan berupa: denda (dalam keadaan tertentu, ini bisa menjadi hukuman pokok); penyitaan barang [terkait dengan pelanggaran]; penyitaan properti; perampasan hak pemilihan; penahanan rumah.

Dalam aturan ketentuan Pasal 353 KUHP Laos yang diberlakukan ialah pidana penjara atau denda 500.000 kip hingga 3.000.000 kip, dengan dibandingkan Hukum Pidana Indonesia, bahwa hukum pidana Laos sama-sama memberikan hukuman penjara disertai dengan denda bagi setiap pelaku penganiayaan hewan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah apa yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Perbandingan Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Dengan Laos Tindak pidana penganiayaan terhadap hewan di Indonesia diatur dalam Pasal 302

KUHP dan Pasal 66A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Peraturan perundang undangan di Indonesia hanya mengatur mengenai penganiayaan terhadap hewan dan penelantaran hewan pada umumnya. Sedangkan tindakan penganiayaan hewan belum diatur secara spesifik namun keberadaannya tetap dilindungi oleh hukum negara tersebut dengan menyamakan kedudukannya dengan manusia sebagai objek yang dilindungi dalam tindak pidana penghancuran dengan penyebaran bahan berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan keberadaan manusia dan hewan, selebihnya ketentuan mengenai tindak pidana penganiayaan hewan belum ditemukan dalam Undang-undang Penal yang diberlakukan pertama kali di Negara Laos ini.

Perbandingan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Dengan Laos. Dari unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dari Indonesia dan Laos ini ditemukan beberapa persamaan, yaitu dari unsur subjek yang melakukan. Dimana dijelaskan pada peraturan Indonesia unsur “Barang siapa” dan pada peraturan Laos di unsur “Individu yang menyalahgunaan hewan atau menganiaya”. Namun dari kedua negara ini juga ditemukan perbedaan pada unsur-unsur tindak pidana penganiayaan pada peraturannya, dimana di Indonesia penekan dititikberatkan pada unsur kesengajaan yaitu sengaja sebagai tujuan, sengaja sebagai kesadaran pasti berhasil dan sengaja dengan kemungkinan berhasil. Namun di Laos, unsur penekanannya lebih kepada aspek penyalahgunaan dan penganiayaan hewan, dengan berbagai istilah-istilah yang serumpun, seperti yang telah dijelaskan pada alenia sebelumnya.

Perbandingan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Dengan Laos. Meskipun terdapat persamaan dari sanksi yang ditetapkan oleh Indonesia dan Laos, di Indonesia peraturan mengenai penganiayaan hewan sanksinya memiliki pengaturan yang berbeda dibandingkan Laos. Dimana dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2 tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali. Berdasarkan penjelasan

dari aturan tersebut, maka dalam pidana denda yang diberlakukan bagi para pelaku penganiayaan hewan diterapkan dengan 1000 kali lipat dari aturan yang diberlakukan. Dalam hal ini, pada peraturan dan sanksi penganiayaan hewan di Laos tidak memiliki peraturan yang melipatgandakan ancaman penjara, kurungan maupun denda, hanya pidana penjara atau denda yang tertera pada ketentuan Pasal 353 KUHP.

4.2 Saran

Pemerintah harus mengkaji ulang substansi pasal 302, 544, 541 dan 544 agar lebih melindungi hak-hak asasi hewan. Sanksi dalam pasal Kesehatan Hewan agar lebih melindungi hak asasi hewan. Sanksi dalam pasal 302 sebaiknya lebih bersifat non penal. Melihat perkembangan masyarakat dewasa ini, penulis merasa 302, 544, 541, dan 544 KUHP sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan dalam kondisi masyarakat sekarang. Perlu adanya penghapusan dan penggantian pasal tersebut dengan ketentuan dan keadaan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Selain itu, diperlukan peraturan perundangan pendukung upaya pencegahan dan penanggulangan dari tindakan-tindakan penganiayaan hewan di Indonesia, dengan memberikan beberapa persyaratan-persyaratan perlakuan dan larangan khusus pada setiap-setiap jenis hewan yang dilindungi.

Untuk Negara Laos ketentuan pidana yang lebih kuat bagi penelantaran hewan, hukuman yang lebih berat bagi residivis, penggantian biaya ganti rugi yang lebih menyeluruh, kewajiban penyitaan hewan apabila ada dugaan pelanggaran Undang-Undang, kewajiban pelarangan kepemilikan hewan di masa mendatang apabila terbukti melanggar Undang-Undang, kewenangan hukum yang lebih luas bagi petugas untuk menegakkan hukum perlindungan hewan, pemberian prioritas tanggal persidangan apabila hewan tersebut ditahan

DAFTAR PUSTAKA

<https://kbbi.web.id/lampau>, Di akses pada tanggal 14 juni 2021.

Pawennei, Mulyati dan Tomalili, Rahmanuddin, (2015). *Hukum Pidana*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Siahaan, R.O. (2009). *Hukum Pidana I*. Cibubur: Penerbit RAO Press.

- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Supanto. (2004). "Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana," *Mimbar*, no. 3 (2004): 288–310.